

MANAJEMEN PERBATASAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA MALAYSIA

Ade Priangani, Alif Oktavian, M. Budiana

Universitas Pasundan

Email : adepriangani@rocketmail.com

Abstrak

Kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia (yang termasuk area IMS-GT dan IMT-GT), memiliki permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan kawasan perbatasan lain, dengan demikian, pengelolaan perbatasan Indonesia- Malaysia belum optimal dikarenakan pengelolaan belum terintegrasi dan masih bersifat ad-hoc, temporer dan parsial.

Kata kunci: *Manajemen, Wilayah Perbatasan, Perbatasan Indonesia-Malaysia*

1. PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dan vital bagi sebuah negara, sebab secara geografis umumnya memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga. (Thontowi, 2009).

Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara mencakup perbatasan darat yang memisahkan kedua negara di Pulau Kalimantan dan perbatasan maritim di sepanjang Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi.

Pada tanggal 26 November 1973, nota kesepahaman ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia sehubungan dengan survei bersama dan demarkasi perbatasan darat kedua negara. Kerja sama ini dimulai pada 9 September 1975 dan selesai pada Februari 2000. Hingga 2006, sebanyak 19 nota kesepahaman dengan 28 peta lokasi yang terkait dengan perbatasan telah ditandatangani oleh kedua negara, yang meliputi jarak 1.822,3 km dari 2.019,5 jarak perbatasan.

Konvensi London 1891 yang ditandatangani oleh Belanda dan Britania Raya menyatakan bahwa ujung timur perbatasan berada pada 4° 10' LU, [Convention of 1891, Article I] yang terus ke arah barat melintasi Pulau Sebatik di lepas pantai Sabah, membagi pulau tersebut menjadi dua; bagian utara dikuasai oleh Borneo Utara Britania, sedangkan bagian selatan dikuasai oleh Hindia Belanda. [Convention of 1891, Article IV: From 4° 10' North latitude on the east Coast the boundary-line shall be continued eastward along that parallel, across the Island of Sebittik: that portion of the island situated to the north of that parallel shall belong unreservedly to the British North Borneo Company, and the portion south of that parallel to the Netherlands]

Perbatasan kemudian melintasi selat antara Sebatik dan daratan, yang membentang di sepanjang garis tengah Tambu dan Sikapal hingga ke bukit-bukit yang membentuk daerah aliran sungai Simengaris (di Indonesia) dan Serudung (di Malaysia). [Agreement of 1915, (2) Starting from the boundary pillar on the West coast of the island of Sibetik, the boundary follows the parallel of 4° 10' North latitude westward until it reaches the middle of the channel, thence keeping a mid-channel course until it reaches the middle of the mouth of Troesan Tamboe. (3) From the mouth of Troesan Tamboe the boundary line is continued up the middle of this Troesan until it is intersected by a similar line running through the middle of Troesan Sikapal; it then follows this line through Troesan Sikapal as far as the point where the latter meets the watershed between the Simengaris and

Seroedong Rivers (Sikapal hill), and is connected finally with this watershed by a line taken perpendicular to the centre line of Troesan Sikapal]

Perbatasan ini pada umumnya membentang ke arah barat laut menuju 4° 20'LU, kemudian mengikuti garis pegunungan di sepanjang daerah aliran sungai yang mengalir menuju Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata, dan berakhir di Tanjung Datu pada koordinat 109° 38'.8 BT 02° 05'.0 LU di ujung barat Sarawak.

1.2. Tinjauan Teoritis

Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah negara atau *state's border* dibentuk dengan lahirnya negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.

Riwanto Tirtosudarmo, mengutip Ricklefs (1981), menyebutkan bahwa perbatasan dari negara yang kini bernama Indonesia adalah dibangun oleh kekuatan militer kolonial (Belanda) dengan mengorbankan nyawa manusia, uang, perusakan lingkungan, perenggangan ikatan sosial dan perendahan harkat dan kebebasan manusia. (I Ketut Ardhana, 2007 :1)

Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Pandangan dimasa lalu bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak telah menjadikan paradigma pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Sebagai wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika sehingga pembangunan dan masyarakatnya pada umumnya miskin dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga.

Dengan berlakunya perdagangan bebas baik ASEAN maupun internasional serta kesepakatan serta kerjasama ekonomi baik regional maupun bilateral, maka peluang ekonomi di beberapa wilayah perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut.

2. METODOLOGI

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan mengambil kasus tunggal di wilayah perbatasan Indonesia-Singapura. Metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah; disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kuantitatif.

Menurut pandangan A. Chaedar Alwasilah (2002:26), Penelitian kualitatif digunakan sebagai istilah pembungkus yang meliputi sejumlah strategi penelitian yang sama-sama memiliki sejumlah sifat tertentu, yang diambil dari serangkaian asumsi yang saling berhubungan yang bersifat khas paradigma penelitian kualitatif. Secara spesifik, sejumlah pakar metodologi penelitian kualitatif (seperti Bogdan & Biklen, 1992; Denzim & Lincoln, 1994; Glesne & Peshkin, 1992), telah mengidentifikasi sejumlah asumsi

filosofis yang mendasari pendekatan penelitian kualitatif. *Pertama*, realitas (atau pengetahuan) dibangun secara sosial. Karena realitas adalah suatu bentukan maka bisa ada realitas jamak di dunia ini.

Kedua, karena realitas (atau pengetahuan) dibentuk secara kognitif (dalam pikiran kita), maka dia tidak terpisahkan dari peneliti. Dengan kata lain, kita tidak dapat memisahkan apa yang kita tahu dari diri kita. Ini berarti pula bahwa kita (hanya) dapat mengerti bentukan (konstruksi) tertentu secara simbolis, khususnya lewat bahasa.

Ketiga, seluruh entitas (termasuk manusia) selalu dalam keadaan saling mempengaruhi dalam proses pembentukan serentak. Oleh karena itu sangatlah musykil kita dapat membedakan secara jelas sebab dari akibat. Keempat, karena peneliti tidak bias dipisahkan dari yang ditelitinya maka penelitian itu selalu terkait nilai.

Serangkaian asumsi epistemologis ini memunculkan sejumlah sasaran penelitian, metodologi (atau teknik) penelitian untuk memahami dan merepresentasikan fenomena sosial, serta peran unik para peneliti terhadap fenomena yang sedang diteliti. Secara lebih spesifik, para pakar metodologi kualitatif telah bersepakat bahwa: (a) tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami (alih-alih menjelaskan berbagai penyebab) fenomena sosial dari perspektif para partisipan melalui pelibatan kedalam kehidupan aktor-aktor yang terlibat; (b) pendekatan penelitian yang paling cocok untuk menangkap fenomena tersebut adalah etnografi yang membantu pembaca memahami definisi situasi yang ditelaah; dan dalam upaya untuk memahami perspektif para partisipan para peneliti perlu meluruhkan diri kedalam fenomena yang sedang dikaji; dan (c) sifat realitas sosial paling baik dikemas-sajikan dalam *thick description*, yang kelak akan dilaporkan kepada para pembaca dalam bentuk naratif.

3. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia terletak di empat wilayah perairan, yakni Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. Wilayah laut kedua negara ini (keduanya sama-sama mengklaim 12-nautical-mile (22 km)) hanya bertemu di Selat Malaka dan Laut Singapura. Perbatasan maritim ini juga terdapat di ujung perbatasan darat antara kedua negara di Kalimantan. Mengenai perbatasan landas benua, hanya perbatasan di Laut Cina Selatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan perbatasan landas benua di Laut Sulawesi belum ditetapkan sama sekali.

Perbatasan darat antara Indonesia-Malaysia membentang sepanjang 2.019 km dari Tanjung Batu di Kalimantan barat laut, melewati dataran tinggi pedalaman Kalimantan, hingga ke Teluk Sebatik dan Laut Sulawesi di sebelah timur Kalimantan. Perbatasan ini memisahkan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat di Indonesia dengan negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia.

Perbatasan maritim di Selat Malaka umumnya ditetapkan berdasarkan garis tengah antara dasar benua Indonesia dan Malaysia, membentang ke arah selatan dari perbatasan Malaysia-Thailand hingga ke titik pertemuan perbatasan Malaysia-Singapura. Sebagian perbatasan ini ditetapkan melalui Perjanjian Perbatasan Landas Benua pada tahun 1969 dan Perjanjian Perbatasan Wilayah Laut pada 1970. Perbatasan landas benua antara Indonesia dan Malaysia di Laut Cina Selatan juga ditarik di sepanjang garis dasar benua antara kedua negara berdasarkan perjanjian 1969.

Perbatasan di Laut Sulawesi telah menjadi subjek persengketaan antar kedua negara. Persengketaan tersebut diselesaikan melalui putusan Mahkamah Internasional

dalam kasus Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002. Meskipun demikian, kedua negara ini masih memiliki klaim yang saling tumpang tindih sehubungan dengan perbatasan, misalnya Ambalat.

Terdapat dua lintas perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia, yaitu antara Tebedu di Sarawak (Malaysia) dan Entikong di Kalimantan Barat, serta antara Lundu-Biawak dan Aruk-Sambas. Jalur perlintasan membentang di sepanjang rute antara Kuching, ibu kota Sarawak, dan Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat.

Entikong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia. Entikong memiliki jalur perbatasan darat dengan Malaysia khususnya Sarawak sehingga jalur darat sering disebut jalur sutera karena bisa dilewati langsung oleh bus baik dari Indonesia maupun dari Malaysia tanpa harus menyeberangi sungai maupun laut, oleh sebab itu banyak TKI yang berasal dari Jawa dan Sumatera yang menggunakan jalur perbatasan Entikong.

Sedangkan PLBN yang berada di Kabupaten Sambas adalah border termegah di Kalimantan Barat. PLBN Terpadu adalah bangunan seluas 2.829 meter persegi di atas lahan seluas 9,1 hektare. Pembangun fasilitas penunjang dan penataan kawasannya masih berlanjut untuk tahap II yang meliputi bangunan seluas 4.441 meter persegi di lahan seluas 17,79 ha. Begitu pula jalan akses sekitar 90 kilometer, pembangunannya masih berlanjut di beberapa titik.

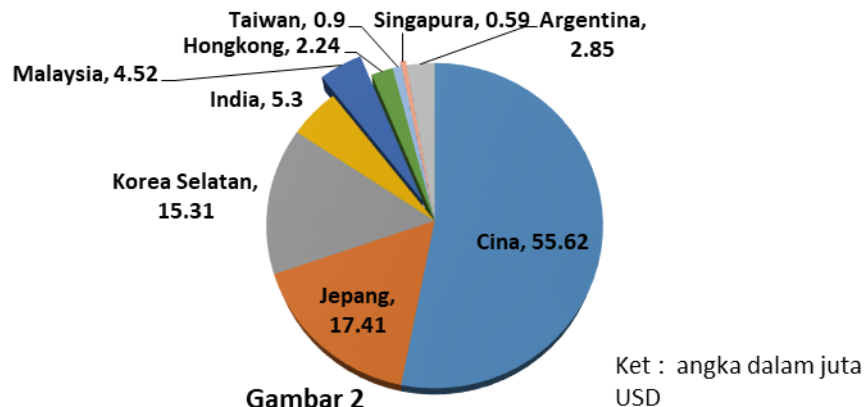
Perbatasan Kalimantan dengan Serawak termasuk dalam tipe natural border, perbatasan yang ditandai oleh bentang alam pengunungan Kapuas Hulu. Kawasan ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Menurut para ekonom perbatasan setidaknya terdapat dua kekuatan besar yang bisa disumbangkan oleh kawasan perbatasan terhadap perekonomian di sekitarnya. *Pertama*, dengan akses perdagangan yang dimiliki, kawasan perbatasan merupakan pintu masuk barang dan jasa; mengalimya devisa ke dalam negeri. *Kedua*, perdagangan yang sehat yang terjadi di perbatasan akan mendorong tumbuhnya produksi di dalam negeri.



Gambar 1 : Pos Penjaga Perbatasan

Dari data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, nilai ekspor Kalimantan Barat untuk bulan Juni tahun 2013 berkisar US\$ 104,74 juta. Ekspor

Kalimantan Barat masih didominasi oleh 3 negara di Asia Timur yaitu China, Jepang dan Korea Selatan. Kontribusi ketiga negara tersebut sebesar 82,02 persen, di mana masing-masing sebesar US\$ 55,62 juta, US\$ 17,41 juta dan US\$ 15,31 juta. Komoditas Ekspor Kalimantan Barat pada Juni 2013 masih didominasi Biji Kerak dan Abu Logam (HS26), Karet dan Barang dari Karet (HS 40), Kayu dan barang dari Kayu (HS 44), dimana Ketiganya menyumbang sebesar 94,29 persen dari total nilai ekspor Kalimantan Barat. Nilai ekspor semester pertama tahun 2013 (Januari-Juni 2013) adalah US\$ 654,36 Juta, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2
Nilai Ekspor Kalimantan Barat

Sumber: BPS Kalimantan Barat, Juni 2013

Masih rendahnya daya saing Kalimantan Barat, dalam pandangan Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, Syarif Abdurrahman, dikarenakan masalah perdagangan luar negeri dominannya ada di pusat, daerah tak bisa berbuat banyak untuk mengambil satu keputusan atau kebijakan. Regulasi semuanya di pemerintah pusat, provinsi hanya beri dorongan dan kemudahan kepada pengusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalbar, berbeda dengan Kepulauan Riau yang menjadi kawasan *Special Economic Zone* (SEZ) dan malah sekarang ditingkatkan menjadi FTZ (*Free Trade Zone*). (Tribun Pontianak, 1 Desember 2013).

Sedangkan untuk investasi, menurut Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalbar, Sri Jumiadatin, realisasi investasi di Kalbar hingga akhir triwulan tiga tahun anggaran 2013 terdiri dari realisasi penanaman modal dalam negeri sebesar Rp4,020 triliun, penanaman modal asing Rp3,727 triliun atau USD372,793 juta, dengan total Rp9,42 triliun. (Pontianak Post, 30 Oktober 2013)

Proyek PMDN yang diminati diantaranya perkebunan tanaman buah penghasil minyak dan industri minyak makan kelapa sawit maupun minyak gorengnya sebanyak 13 proyek. Lokasi proyek berada di Kapuas Hulu, Sintang, Kabupaten Pontianak, Sintang, dan Ketapang. Penanaman modal asing yang diminati yakni perkebunan tanaman buah-buahan penghasil minyak dan industri minyak makan kelapa sawit sebanyak 15 proyek. Proyek tersebut berlokasi di Sambas, Ketapang, Kubu Raya, Bengkayang, dan Landak. Ada juga industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan di Kubu Raya sebanyak satu proyek, PLTU di Kabupaten Pontianak satu proyek, hotel bintang tiga dan empat masing-masing satu proyek di Kota Pontianak, serta restoran satu proyek di Kota Pontianak. (Pontianak Post, 30 Oktober 2013)

Persengketaan perbatasan utama antara Indonesia dan Malaysia terjadi di Laut Sulawesi. Kedua negara saling mengklaim kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan.

Persengketaan seputar blok Ambalat di Laut Sulawesi, yang diyakini kaya akan sumber daya mineral, masih terus berlanjut.

Pada tahun 2008 - 2009, pelanggaran perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangganya sering banyak dilanggar oleh Malaysia. Ini terbukti dengan adanya pelanggaran perbatasan wilayah negara masih terus dilakukan oleh negara tetangga. Malaysia yang paling sering melakukan pelanggaran batas wilayah RI.

Dari catatan Kementerian Polhukam, Provinsi Kalimantan Timur adalah wilayah RI yang paling sering mengalami pelanggaran wilayah oleh negara lain. Untuk pelanggaran wilayah perbatasan perairan Indonesia, di perairan Kalimantan Timur dan seputar Laut Sulawesi telah terjadi 21 kali pelanggaran oleh Kapal Perang Malaysia dan enam kali oleh Kapal Polisi Maritim Malaysia, sementara di perairan lainnya sebanyak tiga kali.

Indonesia dan Malaysia sempat menegang ketika Malaysia membangun tiang pancang mercusuar di Tanjung Datuk. Malaysia mengklaim membangun di atas teritorinya, tapi Indonesia berlandaskan perjanjian pada 1969, menilai pembangunan melanggar perjanjian tersebut. Pembangunan mercusuar di perairan Tanjung Datu, Paloh, Sambas, Kalimantan Barat oleh pemerintah Malaysia menuai permasalahan. Ini membuat pemerintah Indonesia melayangkan protes ke Malaysia.

Pembangunan mercusuar tersebut diketahui oleh TNI AL yang mendapat informasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Hingga saat ini, batas perairan Tanjung Datu masih menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Perairan tersebut masih menjadi wilayah abu-abu atau status quo.

Permasalahan di wilayah perbatasan adalah masalah manajemen, namun sayang, ilmu manajemen hamper luput dari perhatian semua pemimpin Indonesia. Padahal kokohnya suatu Negara terletak kepada bagaimana para pemimpin memiliki kemampuan untuk mengatur sebuah bangsa. Manajemen adalah pondasi terbawah dari seluruh sistem, karena jika manajemen baik, maka semua urusan akan mengikutinya, mirip efek domino. Berkaitan dengan konflik perbatasan RI-Malaysia tak perlu ngotot-ngototan apalagi perang, karena akan menyengsarakan seluruh rakyat dari kedua negara.

Ditinjau dari perspektif keamanan, kondisi daerah perbatasan wilayah Indonesia saat ini berada pada tahap mengkhawatirkan. Hal tersebut ditandai dengan timbulnya berbagai masalah perbatasan seperti kasus Blok Ambalat, kasus Pulau Bidadari dan permasalahan pelintas batas negara. Daerah perbatasan darat merupakan daerah yang terpinggirkan secara geografis dan sosial ekonomi sehingga masyarakat menjadi seolah-olah terpinggirkan.

Kondisi ini menjadikan wilayah perbatasan darat memiliki potensi kerawanan aspek internal maupun eksternal. Dari aspek internal masyarakat perbatasan darat yang terpinggirkan, miskin dan terpinggirkan akan memiliki kesadaran nasional (nasionalisme) yang rendah serta tidak dapat diandalkan sebagai pilar keamanan, yang akhirnya dapat membahayakan eksistensi negara. Dari aspek eksternal, wilayah perbatasan darat merupakan wilayah terbuka bagi pihak luar untuk masuk ke wilayah NKRI maupun bagi warga negara Indonesia untuk keluar, sehingga apabila wilayah perbatasan darat tidak diamankan secara baik, dapat membahayakan kedaulatan NKRI.

Paradigma wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara belum diwujudkan secara optimal, sehingga berdampak kurang menguntungkan bagi Indonesia. Keadaan ini mengesankan bahwa komitmen pemerintah pusat maupun daerah dalam membangun wilayah perbatasan masih rendah. Disisi lain wilayah perbatasan memiliki potensi strategis ditinjau dari aspek kesejahteraan maupun keamanan.

Pengembangan wilayah perbatasan dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara yang berorientasi pada aspek kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan (*security*) telah dilakukan oleh berbagai dinas dan instansi, namun sifatnya masih parsial dan belum komprehensif sebagai suatu kebijakan. Saat ini pengembangan wilayah perbatasan darat perlu dipercepat karena masalah perbatasan darat dari waktu ke waktu semakin kompleks.

Dalam menangani wilayah perbatasan, penyelesaian sengketa wilayah perbatasan dan pengelolaan wilayah perbatasan seringkali bermasalah karena berkaitan dengan kesejahteraan. Misalnya, di wilayah perbatasan dengan Malaysia, banyak orang Indonesia melintas ke Malaysia untuk menjadi pekerja ilegal (*illegal workers*). Sebaliknya, permasalahan di wilayah perbatasan dengan Timor Leste dan Papua Nugini justru sebaliknya.

Permasalahan utama yang masih terus dialami hingga saat ini oleh daerah di perbatasan RI-Malaysia, antara lain: keterisolasian wilayah, infrastuktur dasar, kesejahteraan ekonomi masyarakat. Daerah perbatasan Indonesia umumnya merupakan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dengan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang spesifik. Daerah perbatasan yang sangat terpencil dan sulit terjangkau serta aksesibilitas perhubungan yang belum memadai, menyebabkan keterisolasian wilayah.

Selain itu permasalahan yang dihadapi oleh RI di wilayah perbatasan antara lain: Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang berdampak pada tingginya tingkat kesenjangan wilayah dibandingkan dengan kawasan perbatasan Negara Tetangga. Terbatasnya sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi yang berdampak pada rendahnya tingkat aksesibilitas serta keterisolasian dari wilayah sekitarnya. Globalisasi ekonomi dan sistem perdagangan bebas menyebabkan produk-produk lokal kurang mampu bersaing dengan produk-produk wilayah lainnya. Derajat kesehatan, pendidikan dan keterampilan penduduk umumnya masih rendah. Pemekaran wilayah belum diikuti dengan dukungan sarana dan prasarana serta aparatnya. Rawan terhadap disintegrasi bangsa dan pencurian sumberdaya alam yang berdampak pada kerusakan ekosistem alam dan hilangnya keanekaragaman hayati. Terancam akan berkurangnya luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Dampak eksodus Tenaga Kerja Indonesia yang terusir dari Sabah Malaysia yang tidak tertangani secara tuntas dapat menimbulkan kerawanan masalah-masalah sosial.

Berkaitan dengan keterisolasian wilayah, infrastuktur dasar, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Bupati Malinau Yansen Tipa Padan mengatakan, persoalan klasik di perbatasan yang harus diselesaikan bukan lagi soal pendidikan dan kesehatan, tapi membuka keterisolasian daerah. Jalan itu cara untuk membuka isolasi daerah perbatasan. Dengan interaksi dagang yang intensif dengan warga Malaysia, harusnya hal itu bisa menjadi perhatian bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur di kawasan perbatasan. Sejak kurang lebih tiga tahun lalu sebuah jalan dibuka. Meski baru jalan berbatu, paling tidak bisa menghubungkan ke daerah lain. Karena menggunakan tanah dan batu, jalan tersebut memang sulit dilalui, terlebih saat hujan. Tetapi jalan itu jauh lebih baik daripada tak ada jalan.

Dari perkembangan kondisi aktual yang ada di lapangan, paling tidak terdapat 3 (tiga) isu yang paling menonjol, yakni: Konflik Perbatasan, Illegal Logging, dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara

tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional.

Prioritas pembangunan pemerintah meliputi berbagai aspek, seperti penetapan dan pemeliharaan batas wilayah negara, peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan, percepatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi untuk membuka keterisolasian kawasan.

Tak hanya itu, percepatan peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan juga akan diperhatikan. Juga pengembangan perekonomian dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam secara seimbang dan berkelanjutan serta percepatan penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi

4. Penulisan Kutipan

Pengembangan kawasan perbatasan merupakan upaya untuk mewujudkan hak kedaulatan NKRI sebagai sebuah negara yang merdeka. Oleh karena itu, ruang lingkup pengembangan kawasan perbatasan terkait erat dengan persoalan penyelesaian batas wilayah negara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang amat strategis bagi Indonesia dari segi geo-politik dan geo-strategis. Penyelesaian persoalan perbatasan secara damai dan upaya pengembangan kawasan perbatasan berikut penanganan masalahnya akan memperkuat efektivitas pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi untuk mencapai tujuannya sebagaimana yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945.

Pengembangan kawasan perbatasan juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, yang karena lokasinya yang terpencil dan jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal ini juga sangat penting ditinjau dari aspek ketahanan bangsa. Aspek keamanan itu sendiri tidak semata-mata membicarakan aspek keamanan secara sempit yang melibatkan ancaman konvensional seperti invasi militer negara lain namun secara lebih kompleks, yakni keamanan manusia (human security) secara nasional yang meliputi aspek sosial, ekonomi, bahkan politik.

Diperlukan adanya manajemen satu atap yang terdiri atas berbagai instansi yang berkepentingan dan saling bersinergi. Langkah pemerintah yang cukup konkret adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden no 78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau terluar yang juga melibatkan 17 instansi/departemen yang dikoordinasikan melalui menteri Kelautan dan Perikanan. Namun masih terdapat beberapa masalah seperti siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah tertentu di lapangan dan diperlukannya "payung" yang lebih besar sebagai landasan hukum batas wilayah NKRI dalam bentuk undang-undang. Indonesia perlu membangun eksistensinya di wilayah perbatasan baik darat maupun laut. Keberadaan fisik (bangunan) hingga pengiriman warga negara

Indonesia di pulau-pulau terluar Indonesia yang produktif bisa dilakukan. Pelajaran dari kasus ini adalah tentang (effective occupancy) dimana Malaysia telah menempatkan penduduknya secara efektif bahkan membangun resor wisata di wilayah sengketa itu. Sementara Indonesia tidak melakukan tindakan nyata. Letak geostrategis Indonesia menempatkan negara ini menjadi daerah kepentingan bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Posisi strategis ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan ditingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia. Saat ini, perkembangan lingkungan strategis regional dan global lebih menguat pengaruhnya terhadap kondisi nasional karena diterimanya nilai-nilai universal seperti perdagangan bebas, demokratisasi, serta hak asasi dan lingkungan hidup. Eksistensi kepentingan negara-negara besar di kawasan ini mendorong terjalinnya hubungan timbal balik yang erat antara permasalahan dalam negeri dan luar negeri yang memiliki kepentingan bersama. Informasi kejadian di dalam negeri dengan cepat menyebar ke segala penjuru dunia, selanjutnya negara-negara lain akan memberikan responnya sesuai kepentingannya masing-masing. Sebaliknya, informasi kejadian di negara lain, khususnya negara-negara besar dan negara-negara di kawasan ini, dengan cepat mencapai seluruh wilayah, dan mempengaruhi kondisi nasional. Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan banyak negara di sekitarnya perlu memberikan perhatian yang lebih mengenai masalah perbatasannya dan menyusun suatu manajemen pengelolaan perbatasan negara. Hal ini berkaitan dengan masalah keamanan nasional dari Indonesia itu sendiri yang di dalamnya termasuk keamanan atas teritorialnya. Dalam konteks hubungan internasional, ada banyak kasus dimana konflik antar negara yang berawal dari belum terselesaikannya berbagai persoalan batas negara. Hubungan internasional memusatkan perhatiannya pada studi mengenai pola-pola hubungan antar aktor negara yang diikat oleh batas-batas teritorial. Ruang teritorial ini kemudian akan menentukan kedaulatan, power dan bahkan keamanan yang dimiliki suatu bangsa.

Untuk menjaga batas teritorial dan menagani isu perbatasan yang dialami khususnya di Indonesia, diperlukan suatu kerjasama atau sinergi antara militer dan non-militer dalam penjagaan keamanan. Masing-masing pihak menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuannya namun dalam tujuan yang sama dimana disamping menciptakan nation-state building tapi juga akan mendorong terciptanya suatu regional security building. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki batas-batas wilayah nasionalnya. Jika berbicara mengenai penyelenggaraan negara dalam kaitan dengan wilayah perbatasan,

maka wilayah nasional yurisdiksi Indonesia harus diatur dalam suatu manajemen penyelenggaraan negara yang integratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jaafar & Mark J. Valencia. 1985. *Management of the Malacca/Singapore Straits: Some Issues, Options and Probable Responses*, Akademika No 26, Januari 1985.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia. 2011. *Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025*.
- Depdagri. 2007. *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia, tentang wilayah negara*. Jakarta.
- Gerard McLinden, Enrique Fanta, David Widdowson, Tom Doyle; Editors. 2011. *Border Management Modernization*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), *Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah Perbatasan*, Jakarta, April 2009.
- Lee, Yong Leng. 1988. *The Razor's Edge: Boundaries and Boundary Disputes in Southeast Asia*. Research Notes and Discussion Paper No. 15. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies.
- Rizal Darmaputra. 2009. *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: IDSPS-DCAF.
- Riwanto Tirtosudarmo. 1996. *Demografi Politik: Pembangunan Indonesia dari Riau sampai Timor Timur*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sutopo, AR, 1994, "Hubungan Indonesia, Malaysia, dan Singapura: Dari Konfrontasi, Kolaborasi ke Realiansi", dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS.
- Puslitbang Geologi Kelautan, *Konservasi Potensi Mineral di Perbatasan Indonesia-Singapura*.
- Rizal Darmaputra. 2009. *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*, Jakarta : IDSPS, DCAF.
- Skender Përteshi, Valdrin Grainca and Florentina Hajdari. 2010. *Integrated Border Management in Kosovo*. European Commission Report for 2010.
- Sobar Sutisna (dkk). 2011. *Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*. Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Sutisna, dkk., "Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Indonesia", dalam Ludiro Madu (Ed.). 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan, dan Pilihan Kebijakan*. Graha Ilmu : Yogyakarta.

Dokumendan Media Massa:

- Agreement between the United Kingdom and the Netherlands relating to the Boundary between the State of North Borneo and the Netherland Possessions in Borneo, September 28, 1915.
- Andrea Abdul. 2012. *Strategi Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, Kompasiana, 03 July 2012.

- Border & Migration Police/Albanian State Police – Ministry of Interior. 2006. National Strategy on Integrated Border Management & its Action Plan.
- Convention between Great Britain and the Netherlands Defining the Boundaries in Borneo, June 20, 1891.
- Convention between His Majesty in respect of the United Kingdom and Her Majesty the Queen of the Netherlands respecting the Delimitation of the Frontier between the States in Borneo under British Protection and Netherlands Territory in that Island, March 26, 1928.
- Dede Rosyadi, Merdeka.com, Patok perbatasan RI-Malaysia di Pulau Sebatik bergeser 84 hektare, 30 Maret 2016
- Endang Indriati Wahyuni, “Kawasan Perbatasan Entikong-Kabupaten Sanggau-Kalimantan Barat-Indonesia”, 5 September 2009, <http://citindo.blogspot.com/2009/09/kabupaten-sanggau-provinsi-kalimantan.html>, 7 November 2009.
- European Communities. 2009. Training Manual on Integrated Border Management in EC External Cooperation
- Fayol, Henry. 1949. Administration, industrielleetgenerale. <http://www.referenceforbusiness.com/management/Or-Pr/Pioneers-of-Management.html>
- Jawahir Thontowi, “Masyarakat Marjinal Perbatasan di Kalimantan Barat”, 15 Setember 2009, <http://jawahirthontowi.wordpress.com/2009/09/15/masyarakat-marjinal-perbatasan-di-kalimantan-barat/>, 7 November 2009
- Kawasan Perbatasan Republik Indonesia. Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, http://batas.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=76, diakses 9 Desember 2009.
- Lazuardhi Utama, Rebecca Reifi Georgina, VIVA.co.id, RI-Malaysia Sepakat Tingkatkan Keamanan Perairan Kawasan, 13 April 2016.
- Mohammad Arief Hidayat, Moh Nadlir, VIVA.co.id, Pembangunan Jalan, Solusi Daerah Perbatasan yang Terisolir, 18 Agustus 2015
- Polhukam.BadanPengelolaPerbatasanKelolaAnggaran Rp2,84 Triliun, Jumat, 21 Oktober 2011.
- Pontianak Post, Investasi Kalbar Lampau Target, 30 Oktober 2013.
- Suprayoga Hadi.PENGEMBANGAN KERJASAMA EKONOMI REGIONAL DANPENINGKATAN KINERJA PEMBANGUNAN KAWASAN TIMURINDONESIA. Jakarta:Bappenas.
- The European Commission. Guidelines for Integrated Border Management in the Western Balkans, 2007.
- TRIBUNNEWS.COM, Indonesia Harus Perkuat Daya Saing, 26 Oktober 2013
- TRIBUNNERS, Indonesia Malaysia KerjasamaKembangkanPerbatasan, 10 Maret 2016.